

PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KONSEP SMART CITY PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Rika Acih Karmita

NPP. 30.0581

Asdaf Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Program Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: karmitaa09@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ikhbaluddin, S.Kom, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The city of Bogor is currently one of the cities included in the first 100 cities movement towards a smart city in Indonesia as a pilot project for the smart city concept. **Purpose:** The purpose of this thesis is to determine the application of smart governance in the development of the smart city concept at the Communication and Informatics Office of Bogor City, West Java Province. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive method with an inductive approach that aims to describe phenomena related to the scope of research. Techniques in data collection through interviews, documentation, and observation, after that the data is analyzed using the theory from Giffinger (2007). **Result:** The findings obtained by the authors in this study are 1) Participation Decision Making is running well through smart city forums, SiBadra application, and the Bogor City Government's social media platforms. 2) Transparent Governance has been well realized. 3) Public and social services are running quite well with a note that the government needs to pay close attention to the problems that occur. 4) Strategic Political Perspective has worked well and has been evaluated periodically. **Conclusion:** The results of this thesis indicates that the Bogor City Government, in this case the Bogor City Communication and Information Service as the organizer has implemented smart governance quite well but still exists several things that need to be repaired again, so that smart governance can continue to run optimally.

Keywords: Implementation, Smart City, Smart Governance.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Bogor saat ini menjadi salah satu kota yang masuk dalam Gerakan 100 Kota pertama menuju smart city di Indonesia sebagai pilot project konsep smart city. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan smart governance dalam perkembangan konsep smart city pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terkait dengan lingkup penelitian. Dan teknik dalam pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan juga observasi,

kemudian data dianalisis menggunakan teori dari Giffinger Tahun 2007. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu 1) Pengambilan Keputusan Partisipatif berjalan dengan baik melalui forum *smart city*, aplikasi SiBadra, maupun platform sosial media Pemerintah Kota Bogor. 2) Pemerintah yang Transparansi telah terealisasi secara baik. 3) Layanan Publik dan Sosial berjalan cukup baik dengan catatan pemerintah perlu memperhatikan secara detail terkait kendala yang terjadi. 4) Strategi Perspektif Politik telah bekerja secara baik dan telah dievaluasi secara berkala. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai penyelenggaranya telah menerapkan *smart governance* dengan cukup baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kembali agar *smart governance* dapat tetap berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Penerapan, *Smart City*, *Smart Governance*.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan *smart city* atau kota cerdas telah tersebar secara luas di berbagai belahan dunia, bahkan tidak hanya di bagian negara maju saja baik itu negara berkembang maupun negara yang masih dalam masa pengembangan (*under development*). Pemerintah Indonesia wajib bekerja secara maksimal dengan melihat secara luas dengan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan jalan proses yang terbaik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu solusi yang dapat dilaksanakan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal yaitu dengan penerapan konsep *smart city*. Sejalan dengan penerapan konsep *Smart City* ini dapat menjadi faktor pendukung Pemerintah Daerah dalam menstimulasikan daerahnya, termasuk pada daerah Kota Bogor untuk dapat memaksimalkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Kondisi ini juga membuat pemerintah Kota Bogor dituntut untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam berkreasi dan berinovasi akan pemanfaatan sumber daya teknologi dan manusia yang cerdas serta optimal dalam menciptakan Kota Bogor yang berkembang. Hal ini pun dinilai sangat beriringan dengan misi Kota Bogor yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Menjadikan Kota Bogor yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi”. Secara umum konsep awal *smart city* Kota Bogor telah tertuang dalam *masterplan smart city 2017-2021* yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai bentuk keseriusan Pemerintah terhadap perencanaan pembangunan menuju Bogor *Smart City*. Pemerintah Kota Bogor dalam menerapkan *smart governance* saat ini dengan sasaran pelayanan publik melalui pengelolaan berbagai aplikasi tercatat sebanyak 215 aplikasi yang telah dikelola oleh perangkat daerah Kota Bogor. Dan 120 diantaranya merupakan aplikasi yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Salah satu yang dapat diunduh dan diakses oleh seluruh masyarakat yaitu aplikasi bernama SiBadra (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran). Pelaksanaan pembangunan terhadap konsep *smart city* dalam dimensi *smart governance* yang telah dirancang dalam sebuah kota maka perlu direalisasikannya secara maksimal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan seluruh sumber daya yang dimiliki.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai strategi telah dirancang oleh Pemerintah Kota Bogor demi mencapai hasil yang maksimal dalam penerapan *smart governance* dalam konsep *smart city*. Salah satu strategi Kota Bogor demi mencapai Kota Cerdas adalah dengan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terkait informasi dan komunikasi menggunakan teknologi yang telah berkembang saat ini atau disebut dengan sistem elektronik. Seiring berjalannya waktu sejak dibuatnya susunan rencana strategis yang

tertulis dalam buku masterplan smart city Kota Bogor Tahun 2017-2021 maka penulis memberikan perhatian lebih terhadap penerapan Smart Governance yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, yang mana sudah sangat jelas bahwa Smart Governance atau tata kelola Pemerintahan yang cerdas merupakan salah satu dimensi yang ada dalam terwujudnya Smart City Kota Bogor. Untuk memaksimalkan tujuan mencapai Smart City Kota Bogor yang lebih maksimal maka dalam pelaksanaannya perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyusun strategi lanjutan yang lebih baik lagi, serta menemukan metode yang lebih efektif dan efisien.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan konteks smart city. Penelitian M. Fariz Al Hafiz dan Diah Agung Esfandi berjudul Analisis Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam Program Binjai Smart City Tahun 2017-2018 (Al et al, 2019), menemukan bahwa perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai sangat terorganisir dan berjalan dengan sangat baik melalui langkah yang telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Penelitian Stenly Beteng, Gene Kapantow, Pingkan, dan Egam yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Manado, menemukan bahwa kepatuhan implementor dalam mengimplementasikan program smart city belum cukup sesuai dengan sasaran dari *Masterplan Smart City* Kota Manado (Benteng, Stenly et al, 2021). Penelitian Refinda Sherafi berjudul Evaluasi Pelaksanaan *Smart Governance* di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur (Sherafi, Refinda Chris, 2021) menemukan bahwa dalam pelaksanaan *smart governance* sudah berjalan dengan baik dilihat dari presentase aplikasi terintegrasi yang naik dari tahun sebelumnya. Penelitian selanjutnya yang berjudul Implementasi *Smart City* dalam pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur oleh Dafa Ezra Hasafy (Hasafy, Dafa Ezra, 2021) menemukan bahwa implementasi *smart environment* pada pelayanan *online* via *website* sudah bagus namun belum optimal pada pelayanan *offlinenya*, selain itu dalam *smart living*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart people* telah berjalan secara baik. Penelitian lainnya yaitu yang dibuat oleh Aniq, Eko, dan juga Aulia yang berjudul Pengelolaan Sampah dalam Implementasi *Smart City* di Kota Bogor (Sadiyah et al, 2020) menunjukkan bahwa perlu adanya upaya dalam pengelolaan sampah akibat kepadatan kota yang terjadi seperti Program Sampah 3R, Bank Sampah, dan penerapan pengelolaan sampah berbasis IT. Namun pada penerapannya terdapat kendala terkait kesadaran dan partisipasi masyarakatnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penerapan *smart governance* dalam pengembangan konsep *smart city* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang maksimal, hal ini karena Kota Bogor merupakan salah satu kota pertama yang masuk dalam Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia yang berbeda dengan penelitian M. Fariz, Stenly, Refinda maupun penulis lainnya yang telah disebutkan pada sub bab penelitian terdahulu diatas yakni menggunakan pendapat dari Giffinger (Giffinger, 2007) yang menyatakan bahwa *Smart Governance* dapat diterapkan melalui empat indikator, yaitu pengambilan keputusan partisipatif, pemerintah yang transparansi, layanan publik dan sosial, serta strategi dan perspektif politik.

1.5. Tujuan

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran dengan jelas mengenai bagaimana penerapan *smart governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Provinsi Jawa Barat..

II. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan menggunakan metode deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam mengenai fenomena yang sedang dihadapi oleh objek penelitian yang dilakukan secara keseluruhan dengan cara menjabarkannya dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks yang alamiah dan juga dengan memanfaatkan metode-metode ilmiah. Data yang diperoleh oleh peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diharapkan mampu menyampaikan data yang dibutuhkan dengan jelas. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Giffinger (2007) yang didalamnya terdapat dengan 4 (empat) dimensi dalam *smart governance* yaitu Pengambilan Keputusan Partisipatif, Pemerintah yang Transparansi, Layanan Publik dan Sosial, serta Strategi Perspektif Politik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang penulis lakukan ditujukan untuk menjawab terkait dengan rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan *smart governance* yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam pengembangan konsep *smart city* di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat serta kendala apa yang terjadi dalam penerapan *smart governance* menuju Bogor Smart city oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

3.1. Pengambilan Keputusan Partisipatif (*Participation Decision Making*)

Suatu keputusan yang diambil dalam penerapan *smart governance* perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif yang dapat dilakukan melalui berbagai cara sehingga pemerintah dapat mengetahui suara masyarakat sampai dengan masalah yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pengambilan keputusan yang partisipatif ini dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu:

a) Forum Penampung Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat secara partisipatif dalam penerapan *smart governance* oleh Diskominfo Kota Bogor dapat disampaikan melalui Forum *Smart City*, dan juga melalui aplikasi SiBadra. Pemerintah Kota Bogor telah memiliki forum penampung aspirasi masyarakat sebagai media dalam pengambilan keputusan yang partisipatif melalui Forum *Smart City* yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan juga melalui aplikasi SiBadra yang dapat digunakan dengan sangat mudah dan cepat tanggap, dimana hal tersebut merupakan bentuk penerapan dari konsep *smart governance* Kota Bogor yang telah berjalan dengan baik.

b) Kemampuan Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perkembangan *smart city* harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi terutama pada kemampuan dalam berupaya meningkatkan literasi digital dimana hal tersebut merupakan kriteria yang memiliki keterkaitan langsung dalam perkembangan *smart city*. Masyarakat yang memiliki literasi digital secara baik tentunya dapat memiliki kemampuan untuk ikut terlibat dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga dapat berdampak langsung dalam perkembangan *smart governance*.

c) Akses dalam Menyampaikan Pendapat

Pemerintah telah menyediakan beberapa akses yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya, yaitu akses konvensional dan juga akses digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses tersebut telah berjalan sesuai dengan manfaat dan keadaannya masing-masing. Melalui forum yang ada masyarakat dapat secara langsung berinteraksi dengan pemerintah dimana hal ini merupakan salah satu akses konvensional yang telah dilakukan, ataupun tidak sedikit dari masyarakat juga telah membuat konten dengan menyebutkan sosial media yang dimiliki pemerintah secara resmi dan hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan dari akses digital.

3.2. Pemerintah yang Transparansi (*Transparent Governance*)

Penyelenggaraan pemerintah yang optimal menjadi sebuah sarana dalam pelaksanaan prinsip pemerintah yang transparansi. Pemerintah yang transparansi dalam penerapan *smart governance* diterapkan dengan memberikan kebebasan dalam mengakses informasi masyarakat yang dilihat dari tiga indikator yaitu:

a) Kemudahan Informasi

Pelayanan yang diberikan dalam memudahkan masyarakat Kota Bogor telah terealisasi secara baik, dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi secara resmi hanya dengan menggunakan *website* yang telah disediakan yaitu *website* kotabogor.go.id dan juga *ppid.kotabogor.go.id*. Kemudahan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor dapat menerapkan konsep *smart governance* secara transparansi.

b) Penyedia Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah menjadi penyedia informasi yang inovatif dengan memanfaatkan kondisi teknologi yang ada saat ini yaitu dengan memberikan berbagai informasi melalui postingan yang dibuat semenarik mungkin pada sosial media resmi pemerintah. Karena pada kenyataannya masyarakat saat ini lebih tertarik mencari informasi melalui sosial media yang tersebar luas. Cara ini merupakan cara yang efektif dalam memberikan pelayanan sebagai penyedia informasi yang transparan dengan mengikuti perkembangan zaman.

c) Mekanisme Pengaduan

Fenomena yang peneliti temukan bahwa seluruh kalangan masyarakat saat ini dapat melakukan pengaduannya kepada Pemerintah dengan berbagai cara baik itu menggunakan digital ataupun secara konvensional yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya. Hal ini terus dilakukan Diskominfo Kota Bogor dalam terus berkembang dan berinovasi untuk menjadikan Pemerintah Kota Bogor memberikan pelayanan secara transparansi dengan penerapan *smart governance*. Yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan mekanisme pengaduan sehingga dapat dilakukan dengan semakin mudah yaitu dengan menyediakan nomor telepon SiBadra yang dapat dihubungi melalui aplikasi *Whatsapp*.

3.3. Layanan Publik dan Sosial (*Public and Social Service*)

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan publik dan sosial salah satunya dengan cara mengoptimalkan kemudahan dalam akses pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan segala teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Layanan publik dan sosial ini dapat dilihat dalam lima indikator yaitu:

a) Bukti Fisik

Pemerintah telah menyediakan berbagai layanan publik dan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat salah satunya yaitu telah dibuatnya wifi publik untuk dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Namun fenomena yang peneliti temukan saat ini yaitu terdapat beberapa titik wifi publik ini yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bukti fisik dalam memberikan pelayanan

publik dan sosialnya kepada masyarakat dengan memberikan wifi publik secara gratis kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk dari penerapan konsep *smart governance*.

b) Keandalan

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah menunjukkan bahwa keandalan yang dimiliki telah terealisasi secara baik yang dibuktikan dari hasil indeks kepuasan masyarakat dan dapat ditingkatkan lagi dengan selalu berupaya dalam meningkatkan kompetensi para aparatur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

c) Ketanggapan

Ketanggapan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dengan baik dapat dibuktikan dalam memberikan respon dalam pelayanan aplikasi SiBadra. Hal ini disimpulkan melalui aplikasi SiBadra yang masuk secara cepat dan ditanggapi dengan berbagai tindak lanjut dengan cepat oleh pemerintah.

d) Jaminan Kepastian

Diskominfo Kota Bogor tidak dapat memberikan jaminan mengenai pelayanan langsung kepada masyarakat, karena Diskominfo berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan perangkat daerah yang terlibat sehingga tidak dapat melakukan penilaian terhadap tingkat kinerja atau pelayanan. Hal ini karena jaminan pelayanan kepada masyarakat dikembalikan kepada prosedur operasi standar yang berlaku di perangkat daerah pelaksana penanganan pengaduan tersebut yang disampaikan pada petugas admin perangkat daerah dan petugas pelaksana di lokasi.

e) Emati

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah menunjukkan empatinya dengan memberikan komitmen terkait layanan pusat data untuk menjamin lancarnya koneksitas, akses, dan juga proses dalam perekaman data pada layanan sosialnya. Sehingga bentuk empati yang diberikan nyata adanya. Hal ini dibuktikan bahwa pendataan di Kota Bogor masih bisa terus terpantau dalam akses yang diberikan yaitu melalui website PPID Kota Bogor ataupun website resmi Kota Bogor.

3.4. Strategi Perspektif Politik (*Strategic Political Perspective*)

Strategi perspektif politik pada pembahasan ini dikaitkan dengan kebijakan publik, dimana strategi perspektif politik dimensi ini membahas mengenai sebuah hasil dari proses politik yang selanjutnya melahirkan sebuah kebijakan publik. Pada penyelenggaraan *smart governance* yang dapat diterapkan dalam dimensi strategi perspektif politik ini dilihat dalam empat indikator yaitu

a) Penyusunan Acara

Fenomena yang terjadi saat ini adalah Pemerintahan Kota Bogor berada pada masa fase kedua yaitu menggunakan *Masterplan Smart City 2022-2027* serta Dokumen Arsitektur dan Peta Jalan SPBE Kota Bogor 2022-2027. Masterplan yang direview setiap 1 tahun sekali ini harus selaras dan tidak bertentangan dengan RPJMD Kota Bogor. Sehingga pada penyusunan acara konsep *smart governance* dalam strategi perspektif politik di Kota Bogor telah berjalan sebagaimana mestinya.

b) Formulasi Kebijakan

Pemerintah Kota Bogor telah bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membuat formulasi kebijakan. Sehingga dalam penerapan *smart governance* melalui dimensi strategi perspektif politik seluruh penyusun formulasi kebijakan dapat menghasilkan berbagai kebijakan yang tepat contohnya yaitu kebijakan mengenai pembuatan *Masterplan Smart City*.

c) Adopsi Kebijakan

Penerapan konsep *smart governance* Pemerintah Kota Bogor telah melakukan adopsi kebijakan dengan mengambil dari kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga mengadopsi serta memperbaharui dari *Masterplan Smart City* yang dibuat pada tahun sebelumnya.

d) Evaluasi Kebijakan

Secara berkala Diskominfo Kota Bogor telah mendapatkan evaluasi dari berbagai evaluator baik itu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tim Evaluator Eksternal Nasional, dan juga dari Tim Evaluator Institut Teknologi Bandung (ITB). Dimana hasil dari penilaian evaluasi tersebut dapat menjadi bahan yang baik agar dapat memperbaiki kinerja serta kebijakan untuk waktu yang akan mendatang.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan analisis sejauh mana penerapan *smart governance* dalam pengembangan konsep *smart city* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor menggunakan teori Giffinger mengenai *smart governance* pada Tahun 2007 yang berbeda dengan penelitian lainnya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada lokus penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Penelitian ini dilakukan sebagai analisis pendukung pelaksanaan dan pengembangan konsep *smart governance* di Kota Bogor untuk pertama kalinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aniq, Eko, dan juga Aulia dengan judul Pengelolaan Sampah dalam Implementasi *Smart City* di Kota Bogor (Sadiyah et al, 2020), bahwa penelitian yang dilakukan oleh Aniq, Eko, dan Aulia berfokus pada konsep *smart environment* terkait masalah pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Bogor sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu terkait penerapan konsep *smart governance* yang terjadi di Kota Bogor.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hasil analisis sebagaimana yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan *smart governance* dalam pengembangan konsep *smart city* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah terealisasinya secara baik dengan berbagai strategi yang ada seperti dilaksanakannya Forum *Smart City* dalam mengambil keputusan yang partisipatif, menyediakan berbagai informasi melalui *website* dan sosial media resmi pemerintah sebagai bentuk transparansi yang dilakukan, menyediakan pelayanan publik dan sosial yang unggul, serta membuat strategi perspektif politik secara matang mulai dari pembuatan hingga evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkala. Akan tetapi masih perlu adanya perbaikan untuk memaksimalkan penerapan *smart governance* yang diterapkan dengan melihat beberapa kendala yang terjadi, seperti masih adanya kendala mengenai penggunaan aplikasi SiBadra yang dikeluhkan pengguna, adanya kendala jaringan yang terjadi pada saat melakukan Forum *Smart City*, belum terverifikasinya akun sosial media resmi pemerintah, dan juga masih belum beroperasinya beberapa titik wifi publik yang telah disediakan pemerintah di Kota Bogor.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya memuat sampel penelitian yang hanya ada pada komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, keterbatasan tersebut dapat dilengkapi dengan adanya penambahan perbandingan sampel pada komponen lain yang ada di Kota Bogor sebagai penguat akan hasil penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan *smart city* di Kota Bogor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Perkembangan dalam penerapan *smart governance* melalui konsep *smart city* ini juga dapat menjadi faktor pendukung Pemerintah Daerah dalam menstimulasikan daerahnya, termasuk pada daerah Kota Bogor untuk dapat memaksimalkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Allah SWT, kedua orang tua penulis yang sepenuh kasih mendukung penulis dengan seluruh cintanya, keluarga, dan juga adik tercinta. Kepada Bapak Dosen Pembimbing, Bapak Ikhbaluddin, S.Kom., M.Si, dan seluruh sahabat yang mendukung penulis dengan doa-doa yang melangit sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al, M. Fariz, Hafiz Diah, Agung Esfandari, and M. Si. 2019. "Analysis of Communications Strategy for Communication and Informatics Department of Binjai City in Binjai Smart City Program Period 2017-2018." *Open Library Telkom* 6(1):2017–18.
- Benteng, Stenly. 2022. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA MANADO Evaluation of Smart City Policy Implementation in Manado City Stenly Beteng , Gene H . M . Kapantow , Dan Pingkan P . Egam Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Program Pascasarjana Un." 3:575–87.
- Giffinger, R. 2007. "Smart Cities Ranking of European Medium-Sized Cities." *Research Institute for Housing, Urban and Mobility Services* 16(October):1–24.
- Hafasy, Dafa Ezra. 2021. "IMPLEMENTASI SMART CITY DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR." 1–12.
- Sadiyah, Aniq. 2020. "PENGELOLAAN SAMPAH DALAM IMPLEMENTASI SMART CITY DI KOTA BOGOR Aniq Fajriyati Sadiyah , Eko Priyo Purnomo , Aulia Nur Kasiwi . Kota Bogor." 1-25.
- Sherafi, Refinda Chris. 2021. "Evaluasi Pelaksanaan *Smart Governance* di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur." 2021-17